

DAFTAR PUSTAKA

- Anynda, N. S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Artini, N. K. Y., Diatmika, I. P. G., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan Partisipasi Komite Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(03), 548–558. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i03.75755>
- Astuti, D. P. M., Sari Dewi, G. A. K. R., & Julianto, I. P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 10, Issue 3).
- Calcabilla, C., Budiman, & Dyastari, L. (n.d.). *Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda The Effectiveness of Electronic Parking (E-Pakring) Application at Parking Management in Samarinda City*.
- Candra, K. D. A., & Purnamawati, G. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berbasis Religius Magis pada Sistem Pemberian Kredit di LPD Desa Sudaji. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 509–516.
- Fajri, N. (2019). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2007-2016*.
- Gandasari, M., Junaidi,), Fauzi, A., & Sari, K. (2020). Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya *Oleh* (Vol. 09).
- Islamiah, M. (2020). Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (Ppm) Sampit Kabupaten Kota Waringintimur.
- Madyati HRP, I. T. (2023). *Skripsi Implentasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi*

Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan).

Pradita, S. D. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman).

Purnamawati, I. G. A. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1).
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3002>

Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>

Rangkuty, M. H. F., M. Nawawi, Z., & Nasution, J. (2023). Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 3, 524–539.

Setiaji, D. P., & Santoso, R. S. (2019). Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal.

Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, I. G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.

Taroreh, G., Inggriani, E., & Steven, T. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5, 913–920.

Internet

Wijaya Kusuma, 2023, E-Parkir Pasar Anyar Singaraja Diresmikan, Tambal Kebocoran-Naikkan PAD, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647209/e-parkir-pasar-anyar-singaraja-diresmikan-tambal-kebocoran-naikkan-pad>. , Diakses pada tanggal 29 November 2023 Pukul 16:35 WITA

KBBI Daring edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
<https://kbbi.web.id/pengaruh> Diakses pada tanggal 16 Desember 2023
Pukul 21:10 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).

